

Judul : Respons DPR Lambat dan Terkesan Telantarkan Nasib PRT
Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Respons DPR Lambat dan Terkesan Telantarkan Nasib PRT

LEMAHNYA regulasi yang mengatur dan melindungi keberadaan pekerja rumah tangga menyebabkan mereka rentan terhadap pelanggaran hak-haknya dan nasibnya semakin memburuk. Hadirnya UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) mutlak diperlukan.

Demikian benang merah dan kesimpulan dari dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), kemarin, dengan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(PPPA) dan Eva K Sundari dari Institut Sarinah.

Data dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menyebut dalam kurun waktu 2016-2022 ada 2.637 PRT yang melaporkan kasus. Terdapat 1.148 kasus terkait ekonomi seperti upah yang tidak dibayarkan, upah dipotong dan THR tidak dibayar. Selain itu, kasus jam kerja tidak jelas, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan kesehatan dan beban kerja tidak terbatas kerap terjadi.

Dirjen Pembinaan dan Peng-

awasan K-3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sudah lebih dari 19 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) belum disahkan. Padahal, saat ini jumlah PRT di Indonesia lebih 4 juta jiwa rentan kehilangan hak-haknya. "Memang UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tidak eksplisit bisa melindungi saudara-saudara kita karena sifat dan perlindungannya," ujarnya.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, mengatakan bahwa melihat data

dan fakta, RUU PPRT sangat urgent untuk segera disahkan. Apalagi, PRT notabene merupakan kaum perempuan yang tentu rentan terhadap diskriminasi ataupun kekerasan.

Sementara itu, Direktur Institut Sarinah Eva K. Sundari menilai bahwa nasib PRT saat ini justru makin memburuk. Dari berbagai data dan fakta tergambar jelas bahwa hak-hak PRT sering diabaikan, bahkan kerap menjadi korban *trafficking*.

Meski sudah ada peraturan menteri, Eva menyebut hal itu tidak efektif. Selain itu, kebanyakan PRT berasal dari keluarga miskin. "Sudah sepatutnya negara hadir untuk melindungi warganya yang lemah. (Van/H-1)